

PERBANDINGAN POSISI IPS PADA KURIKULUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

I Nengah Suastika

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali

e-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum Indonesia dengan Social Studies pada kurikulum Amerika Serikat. Metode penelitian bersifat studi pustaka, yaitu menganalisis berbagai macam artikel, buku dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif yang diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan kaitan logisnya. Hasil analisis menunjukkan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum Indonesia diawal kemerdekaan termasuk dalam kelompok dasar yaitu kelompok mata pelajaran wajib yang dibangun untuk mengembangkan keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Kemudian pada kurikulum 1968 Ilmu Pengetahuan Sosial termasuk kelompok cipta yaitu mata pelajaran pendalaman pada jurusan tertentu. Kurikulum 1975 dan seterusnya mengembalikan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dasar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan materi yang bersifat fusi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. *Social studies* di Amerika Serikat memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan nasionalis. *Social studies* merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk *good citizenship*. Walaupun Social Studies merupakan seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, melalui *National Council for the Social Studies* (NCSS) dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasaan dan kedalaman materi yang jelas.

Kata Kunci : kurikulum, posisi, mata pelajaran.

ABSTRACT

This study aims to examine the comparison of the position of Social Sciences in the Indonesian curriculum with Social Studies in the United States curriculum. The research method is literature study, namely analyzing various articles, books and research results that are relevant to the problem. The data collection technique was carried out by means of a literature study with a library study guide instrument developed by myself. The data analysis technique was carried out descriptively, starting with collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions based on their logical connection. The results of the analysis show that the position of Social Sciences in the Indonesian curriculum at the beginning of independence was included in the basic group, namely the compulsory subject group which was built to develop social skills and the spirit of

nationalism. Then in the 1968 curriculum of Social Sciences, including the copyright group, namely deepening subjects in certain majors. The 1975 curriculum onwards restores the position of Social Sciences as a basic subject from basic education to secondary education, with material that is a fusion of social sciences and humanities. Social studies in the United States has a strategic role to develop intelligent and nationalist citizens. Social studies is a combination of social sciences and citizenship with the aim of forming good citizenship. Although Social Studies is a selection and adaptation of social sciences and humanities disciplines for educational purposes, through the National Council for the Social Studies (NCSS) ten themes of excellence in Social Studies have been developed so that they have a clear breadth and depth of material.

Keywords: *curriculum, positions, subjects.*

PENDAHULUAN

Secara akademis Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dan formulasi dari berbagai kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti sejarah, geografi, sosiologi, politik, hukum, ekonomi dan budaya untuk tujuan pendidikan. Sehingga Ilmu Pengetahuan Sosial sering dikelompokkan menjadi tiga aliran, yaitu: (1) aliran yang berpendapat Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu sosial, karena itu sekolah harus mengajarkan sejarah, geografi, politik, ekonomi, dan lainnya, (2) aliran yang berpendapat Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan fusi dari berbagai disiplin ilmu sosial sehingga tidak lagi dikenal adanya batas-batas dari setiap disiplin ilmu, dan (3) aliran yang menginginkan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai disiplin khusus dengan tokohnya Jarome S. Bruner seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif (Farisi, 2013). Berdasarkan pada pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial di atas, tampak Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia lebih mengacu pada pengertian yang pertama, yaitu sebagai konfigurasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga peran cabang-cabang ilmu di luar ilmu-ilmu sosial dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu pengetahuan yang membahas hubungan manusia dengan masyarakat dan juga membahas tingkah laku manusia dalam masyarakat (Suastika, 2021).

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisir, disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kerjasama disiplin ilmu pendidikan dengan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan, yaitu adanya seperangkat kemampuan: (a) memilih (menyederhanakan) bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, (b) mengorganisasikan bahan pendidikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan, (c) menyajikan (metode) pendidikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan, dan (d) mengevaluasi hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Rahmad, 2016). Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mempersiapkan warganegara yang memiliki keterampilan sosial, spiritual, moral, individual dan vakasional yang memadai sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berkenaan dengan itu maka praktik pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mesti diupayakan pada proses pelatihan pemecahan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam setiap masalah yang dihadapinya. *Social Studies programs have a responsibility*

to prepare young people to identify, understand, and work to solve problems that face our increasingly diversified nation and interdependence world. Over the past several decades, the professional consensus has been that such programs ought to include goals in the broad areas of knowledge, democratic values, and skills. Program that combine the acquisition of knowledge and skills with the application of democratic values to life through social participation present an ideal balance in social studies. It is essential that these major goals be viewed as equally important. The relationship among knowledge, values, and skills is one of mutual support (Nursyifa, 2019).

Berdasarkan pada definisi dan tujuannya, *social studies* tersebut menyuratkan dan menyiratkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, *social studies* merupakan mata pelajaran pokok pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sekolahan; *kedua*, tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warganegara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi; *ketiga*, isi pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dan ilmu sosial, serta dalam banyak hal dari humaniora dan sains; dan *keempat*, pembelajarannya menggunakan cara-cara yang membangkitkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan pengalaman pribadi siswa (Endayani, 2017). Bertalian dengan itu, layak untuk dianalisis mengenai posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan posisi *Social Studies* pada kurikulum Amerika Serikat. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai seberapa urgen Ilmu Pengetahuan Sosial pada kedua negara dan pengaruhnya terhadap kemajuan masing-masing negara.

Kajian yang utuh mengenai posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia akan memberikan gambaran yang utuh tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial dari masa kemasa. Terlebih Indonesia senantiasa melakukan perubahan kurikulum dengan reposisi Ilmu Pengetahuan Sosial yang bersifat esensial, terutama dalam materi, metode, pola evaluasi sampai pada kedudukan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam kurikulum (Speidel, 2018). Posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada masa awal kemerdekaan dalam kurikulum merupakan hal yang bersifat strategis, karena dianggap sebagai kurikulum inti atau dasar yang mesti diajarkan pada jenjang sekolah dasar sampai pendidikan menengah atas. Namun dalam perubahan selanjutnya Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan pelengkap pada jurusan tertentu atau tidak memiliki posisi yang strategis. Hal ini sangat berbeda dengan posisi *Social Studies* pada kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Kondisi ini berpengaruh terhadap kompetensi lulusan dan orientasi masyarakat, khususnya berkaitan dengan keterampilan sosial dan keterampilan warga negara yang demokratis. Kemudian analisis komparasi ini menjadi sesuatu yang urgen untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, terstruktur dan ilmiah mengenai posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yaitu menganalisis dan memformulasi berbagai bahan-bahan yang berasal dari hasil penelitian, buku dan artikel yang berkaitan dengan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan posisi *Social Studies* pada kurikulum di Amerika Serikat (Mills & Birks, 2014). Penulisan ini

bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan posisi *Social Studies* pada kurikulum di Amerika Serikat (Erwin et al., 2011). Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif yang diawali dengan mengumpulkan data bertalian dengan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan posisi *Social Studies* pada kurikulum di Amerika Serikat (Zealand, 2004). Tahap kedua melakukan pemilihan dan pemilihan data sesuai dengan kebutuhan dan masalah penelitian. Tahap ketiga melakukan penyajian data secara renik untuk mendapatkan gambaran yang lebih oprasional mengenai jawaban terhadap rumusan masalah (Schroeder, 2006). Terakhir menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif atau metode penalaran merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus (Erwin et al., 2011).

PEMBAHASAN

Posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis, karena mempelajari tentang keadaan asyarakat yang cepat perkembangannya, tidak lepas dari perkembangan. Pengembangan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Segi lain yang menyebabkan dikembangkannya kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap anak didik adalah menyiapkan mereka kelak apabila terjun ke dalam kehidupan masyarakat (Endayani, 2017). Sejak diberlakukan kurikulum tahun 1964 sampai kurikulum 1968, program pengajaran ilmu-ilmu sosial masih menggunakan cara-cara (pendekatan) tradisional. Ilmu sosial seperti sejarah, geografi (ilmu bumi) dan ekonomi masih disajikan secara terpisah. Sejumlah ahli menyadari bahwa sebenarnya sistem tersebut telah usang dan tidak relevan. Adapun kebutuhan belajar siswa adalah: (1) pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat, (2) laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut, dan (3) agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebihrelevan dengan tuntutan masyarakat yang ia akan menjadi bagiannya dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Segi lain yang menyebabkan dikembangkannya kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap anak didik adalah menyiapkan mereka kelak apabila terjun ke dalam kehidupan masyarakat (Speidel, 2018).

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada saat Kurikulum Tahun 1964 terdapat pertentangan antara kelompok komunis dengan rakyat Indonesia. Pertentangan itu kemudian berakhir dengan kegagalan Partai Komunis Indonesia melawan

kekuatan rakyat Indonesia yang gigih mempertahankan kehidupan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila (Farisi, 2013). Dalam struktur kurikulum pendidikan dasar tahun 1964 dikenal adanya dua kelompok mata pelajaran yakni kelompok dasar dan kelompok cipta. Kelompok dasar adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dianggap paling dominan dalam mengembangkan kepribadian siswa dan siswi sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran kelompok dasar ini terdiri atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Kedua mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam membina kualitas siswa dan siswi sebagaimana yang diharapkan. Lebih-lebih dalam suasana kehidupan politik bangsa baru yang memerlukan adanya identitas bangsa yang kuat. Mata pelajaran kelompok cipta adalah kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di luar wilayah geografis Indonesia (Nursyifa, 2019). Mata pelajaran kelompok cipta ini terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia. Kedua mata pelajaran ini merupakan bagian disiplin sejarah dan geografi yang mewakili pendidikan ilmu-ilmu sosial yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Mata pelajaran sejarah dapat memberikan landasan yang kuat karena mampu memberikan gambaran tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara. Sebagai contoh keberadaan kerajaankerajaan di Nusantara dapat dijadikan dasar legitimasi yang kuat untuk menyatakan keberadaan bangsa Indonesia. Demikian pula mata pelajaran geografi Indonesia yang dapat berperan sama dengan sejarah Indonesia. Wilayah Republik Indonesia sebagai kelanjutan wilayah Hindia Belanda merupakan sesuatu yang perlu dikenal dengan baik oleh generasi muda bangsa. Keanekaragaman pulau-pulau dan jumlah pulau yang banyak dapat membangkitkan kekaguman dan menjadi perekat bangsa. Dengan demikian, keberadaan mata pelajaran sejarah Indonesia dan geografi Indonesia dapat memberikan sumbangan yang sama besar dalam mengembangkan wawasan kebangsaan pada diri siswa dan siswi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Ilmu-ilmu social dianggap penting. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam kurikulum mengindikasikan bahwa pendidikan sejarah dan geografi tidak hanya diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan pada diri siswa dan siswi, namun juga dirumuskan dalam upaya mengembangkan wawasan keilmuan yang cukup kuat (Rahmad, 2016). Artinya, mata pelajaran sejarah Indonesia, sejarah dunia, geografi Indonesia, dan geografi dunia diajarkan untuk mengembangkan wawasan dan cara berfikir yang sesuai dengan ciri khas kedua disiplin ilmu tersebut. Berbeda dengan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial pada pendidikan dasar, pada kurikulum pendidikan menengah istilah yang digunakan untuk struktur kurikulum adalah kelompok dasar dan kelompok khusus. Kelompok dasar adalah kelompok mata pelajaran yang harus diambil semua siswa dan siswi. Sedangkan kelompok khusus adalah mata pelajaran yang hanya diambil oleh siswa dan siswi yang memasuki jurusan tertentu (pada waktu itu ada jurusan alam, sosial, dan budaya). Mata pelajaran pada kelompok dasar meliputi sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Sedangkan kelompok khusus adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan pendalaman pada jurusan tertentu, seperti jurusan Ilmu sosial mempelajari mata pelajaran sejarah dunia, geografi dunia dan ekonomi. Jadi untuk kurikulum 1964 pada pendidikan menengah mata pelajaran sejarah, ekonomi dan geografi merupakan perwakilan pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Dari bahasan di depan, jelas bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial dalam Kurikulum 1964 mendominasi pemikiran kurikulum saat itu. Meskipun di negara asal Ilmu Pengetahuan Sosial

(*social studies*), di Amerika Serikat, sudah terjadi perubahan mengenai ruang lingkup pendidikan ilmu-ilmu sosial, namun perubahan yang terjadi di Amerika itu masih bersifat lokal dan belum merupakan sesuatu yang bersifat nasional. Pada waktu itu para pemikir kurikulum di negara itu masih mendasarkan diri pada pendidikan sejarah dan geografi sebagai dasar utama pendidikan ilmu-ilmu sosial. Hal ini, sejalan dengan pendapat beberapa ahli pendidikan ilmu-ilmu sosial. Sejarah, geografi, dan psikologi dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang bersifat korelatif dan integratif. Geografi memiliki ruang lingkup kajian mengenai distribusi keruangan manusia dan pengaruhnya dalam skala besar terhadap dunia sehingga berbagai konsep, generalisasi, dan teori dari disiplin lain dapat dikembangkan di atasnya. Demikian juga sejarah dapat dijadikan dasar kedua karena sejarah membahas distribusi waktu dan hasil-hasil yang dicapai umat manusia sehingga mampu mendasari berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat manusia. Psikologi berkenaan dengan kajian mengenai organisasi internal keutuhan manusia sehingga dapat menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan manusia dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya umat manusia (Dasar et al., 2019). Keterkaitan ketiga disiplin ilmu itu sebagai kaki tiga yang menopang ekonomi, sosiologi, antropologi, pemerintahan, dan etika dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ia mengemukakan bahwa di atas ketiga kaki inilah dibangun pendidikan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kedudukan pendidikan sejarah dan geografi dalam Kurikulum 1964 sukar ditentukan dan bukan tujuan pembahasan ini untuk membuktikan pengaruh tersebut. Lagipula, tidak keseluruhan pemikiran tersebut diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial. Suatu hal yang jelas, secara resmi suasana politik di Indonesia pada saat Kurikulum 1964 dikembangkan tidak menginginkan adanya pengaruh Amerika Serikat. Semangat politik bangsa Indonesia yang didominasi oleh ajaran MANIPOL-USDEK serta sikap anti Barat (terutama Amerika Serikat) tidak menghendaki adanya pengaruh tersebut. Apalagi pengaruh dalam pendidikan yang merupakan sesuatu yang peka dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa pada masa depan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam status pendidikan ilmu-ilmu sosial di Indonesia saat itu adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial di tingkat perguruan tinggi di Indonesia masih terbelakang. Perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia meskipun banyak jumlahnya, namun ilmu-ilmu sosial belum banyak mendapat perhatian kecuali pada ekonomi (Endayani, 2017). Anthropologi masih merupakan barang langka di banyak perguruan tinggi. Demikian pula sejarah, sosiologi, politik, dan geografi. Dengan demikian tuntutan akademik terhadap kurikulum sekolah di bawahnya, terutama pendidikan dasar dan menengah, belum kuat. Kenyataan lain adalah perhatian utama para pengambil keputusan kurikulum, (pada waktu itu dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah) belum mendasarkan diri pada pengembangan keilmuan yang lebih luas. Selain itu, kenyataan di lapangan dan teori menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di tingkat persekolahan tidak selalu harus diupayakan untuk pengembangan keilmuan yang masih langka (Dasar et al., 2019). Oleh karena itu mudah dipahami disiplin ilmu-ilmu sosial lain belum mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Realitas lain adalah dampak kurikulum yang demikian bagi persiapan siswa dan siswi untuk pendidikan lanjutan di perguruan tinggi belum merupakan masalah besar. Tuntutan yang diajukan perguruan tinggi mengenai dasardasar keilmuan apa saja yang harus dikuasai siswa dan siswi di MA/SMA belum kuat dan jelas (sebetulnya sampai sekarang pun tuntutan itu tida pernah jelas). Fakultas-fakultas yang ada

di perguruan tinggi tidak mengajukan persyaratan yang jelas mengenai mata pelajaran yang harus dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA dan sejauh mana mereka harus menguasai mata pelajaran tersebut sebagai persyaratan masuk ke fakultas tertentu. Seperti keadaan sekarang, persyaratan yang diajukan perguruan tinggi sering terlalu umum yakni hanya berdasarkan jurusan/program khusus/ program inti yang ditempuh siswa dan siswi sewaktu di MA/SMA. Mereka yang berminat ke fakultas kedokteran, alam, dan juga teknologi, harus berasal dari jurusan alam. Sedangkan jurusan sosial mempersiapkan mereka yang akan melanjutkan ke berbagai fakultas ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sospol, dan psikologi (beberapa fakultas psikologi bahkan hanya menerima tamatan alam). Konsekuensinya, materi yang mereka pelajari di SMA tidak langsung menjadi dasar bagi materi yang akan mereka pelajari di perguruan tinggi. Konsekuensi lain dari ketidakjelasan tuntutan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi mengajarkan kembali apa yang sudah pernah dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA. Hal ini disebabkan perguruan tinggi merasa bahwa materi yang dimaksudkan dianggap penting, sedangkan mereka tidak yakin bahwa materi tersebut sudah dipelajari di MA/SMA sebagaimana mestinya. Dalam situasi semacam ini tentu yang menjadi korban adalah siswa dan siswi yang diterima menjadi mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat (Leavy et al., 2014). Siswa dan siswi terpaksa harus mempelajari kembali bahan yang sudah pernah mereka pelajari dalam tingkat kedalaman yang tidak berbeda (terutama untuk mata kuliah yang bersifat pengantar di perguruan tinggi).

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1968. Sejalan dengan perkembangan politik bangsa pada saat itu, Kurikulum Tahun 1964 mengalami perubahan dengan terbitnya Kurikulum Tahun 1968. Dalam Kurikulum Tahun 1968 untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan ilmu sosial masih tetap diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi, dan ekonomi. Perubahan nama dari kurikulum sebelumnya adalah nama mata pelajaran civics pada kurikulum 1964 diubah menjadi kewarganegaraan (Farisi, 2013). Beberapa waktu kemudian diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dan terakhir disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedudukan pendidikan ilmu sosial dalam Kurikulum 1968 tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau khusus.

Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1975. Pengembangan Kurikulum Tahun 1975 merupakan awal baru dalam sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh Kementerian/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi oleh suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Model pengembangan Kurikulum Tahun 1975 menjadi lebih jelas, baik dari segi pendekatan maupun tujuannya. Model pendekatan tujuan ini dikenal pula dengan nama model Tyler dan mempunyai pengaruh yang besar di Amerika Serikat. Pada fase ini pengaruh pendidikan Amerika Serikat mulai menguat di Indonesia terutama melalui para sarjana yang pulang dari belajar di negara tersebut. Selain model pengembangan, dalam kurikulum baru digunakan pula pendekatan pengembangan materi kurikulum yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jika dalam kurikulum sebelumnya disebutkan nama disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran dalam kurikulum 1975 digunakan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum dasar materi *broadfile* Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi disiplin geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Untuk

jenjang MI/SD mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan sesuai dengan ide IPS, sedangkan untuk jenjang MTs/SMP menggunakan pendekatan terpisah. Untuk kurikulum IPS pada jenjang pendidikan menengah, materi IPS meliputi geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang (Farisi, 2013). Dalam Kurikulum Tahun 1975 dinyatakan bahwa IPS adalah paduan (fusi) sejumlah mata pelajaran ilmu sosial. Dari batasan pengertian IPS, tampak bahwa definisi IPS yang digunakan pada Kurikulum Tahun 1975 sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam definisi itu dikatakan bukan paduan dari sejumlah mata pelajaran ilmu sosial tetapi sejumlah mata pelajaran sosial. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan kemudian ialah apakah pengertian mata pelajaran sosial sama maksudnya dengan pelajaran ilmu-ilmu sosial? Dalam dokumen kurikulum yang disebut Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang dimaksudkan sebagai mata pelajaran sosial adalah disiplin ilmu-ilmu sosial. Untuk IPS pada jenjang pendidikan dasar disebutkan bahwa materi pelajaran IPS ditunjang geografi dan kependudukan, sejarah, dan ekonomi-koperasi, sedangkan untuk menengah IPS mencakup geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Jadi, orientasi pendidikan IPS pada pendidikan disiplin ilmu jelas tergambar dalam dokumen kurikulum. Artinya, integrasi yang dimaksudkan adalah integrasi materi dari berbagai disiplin ilmu tersebut (Dasar et al., 2019).

Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1984. Kurikulum Tahun 1984 merupakan penyempurnaan Kurikulum Tahun 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD dan MTs/SMP, sama seperti dalam Kurikulum 1975. Disiplin ilmu yang dimasukkan dalam mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar (MTs/SMP) menjadi lebih luas dibandingkan dengan Kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan materi baru bagi IPS. Dilihat dari jumlah disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan bahwa Kurikulum Tahun 1984 untuk IPS lebih maju jika dibandingkan dengan Kurikulum Tahun 1975. Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar, untuk jenjang pendidikan menengah, nama IPS tidak lagi digunakan, melainkan disiplin ilmu sosial itu sendiri. IPS untuk jenjang pendidikan menengah diwakili mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi-sosiologi, dan tata negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan itu merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan demikian tiap-tiap disiplin ilmu memiliki GBPP yang berbeda yang secara fisik terpisah dan isinya tidak berhubungan. Selain itu, mata pelajaran ilmu-ilmu sosial tersebut berbeda dalam status kurikulum mereka. Ada yang, dimasukkan ke dalam kelompok program inti dan ada yang dimasukkan menjadi kelompok program-pilihan. Program inti adalah program yang diberikan kepada semua siswa dan siswi, sedangkan program pilihan hanya diberikan kepada kelas atau jurusan tertentu.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1994. Kurikulum IPS Tahun 1994 adalah kurikulum yang akan digunakan pada tahun 1994. Seperti kurikulum sebelumnya, nama tahun digunakan bagi suatu kurikulum untuk menyatakan waktu mulai berlakunya. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini mulai digunakan pada tahun 1994, yaitu pada tahun ajaran 1994/1995. Dalam Keputusan Mendikbud Nomor 060/U/1993 disebutkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar terdapat mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang mencakup ilmu bumi, sejarah (nasional dan umum), dan ekonomi. Walaupun kalangan ilmuwan geografi tidak

sependapat dengan istilah ilmu bumi dan keduanya dianggap tidak sama, dalam kurikulum ini yang dimaksudkan dengan ilmu bumi adalah geografi yang dikenal dalam kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, keputusan yang sama menunjukkan bahwa mata pelajaran IPS memperhatikan pengertian dasar dari konsep-konsep pendidikan disiplin ilmu sosial yang menjadi anggota IPS. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa IPS sebagai suatu nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar memiliki anggota disiplin ilmu yang sama dengan kurikulum sebelumnya. Demikian juga kajian terhadap rancangan GBPP memperlihatkan bahwa pendekatan pengajaran yang integratif hanya berlaku untuk jenjang pendidikan dasar di MI/SD, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar di tingkat MTs/SMP pendekatan disiplin ilmu terpisah (*separated disciplinary approach*) merupakan sesuatu yang tetap dominan (Endayani, 2017). Bahkan, dalam rancangan GBPP tersebut dinyatakan bahwa geografi, sejarah, dan ekonomi masing-masing mendapatkan jatah 2 jam pelajaran per minggu. Artinya, GBPP IPS MTs/SMP menyatakan bahwa tiap anggota kurikulum IPS itu bersifat mandiri dengan tujuan, materi, dan juga jam pelajaran yang terpisah. Bentuk pengajaran yang terpisah dan berdasarkan pendekatan disiplin ilmu itu terlihat secara jelas dalam setiap komponen GBPP (tujuan, pengalaman belajar, dan materi). Tampak di setiap kelas dan setiap catur wulan (sistem semester yang dianut Kurikulum 1984 diganti dengan satuan lama yaitu catur wulan, berlaku untuk pendidikan dasar, MI/SD dan MTs/SMP, serta pendidikan menengah MA/SMA). Komponen-komponen kurikulum untuk ketiga disiplin itu dijejerkan sehingga secara fisik terlihat dekat. Secara konseptual antara ketiganya tidak berhubungan. Dalam GBPP disebutkan bahwa kondisi ideal mengajarkan IPS di MTs/SMP dan MA/SMA adalah setiap disiplin ilmu dalam IPS diajarkan oleh guru yang berbeda. Hanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan ketiga disiplin tersebut diajarkan oleh guru yang sama. Anjuran yang demikian tidak saja memperkuat kemandirian (ketiadaan hubungan antara ketiga disiplin itu dalam satu kurikulum yang sama), tetapi juga menunjukkan bentuk pendidikan ilmu-ilmu sosial yang diinginkan. Kiranya penggabungan ketiganya dalam satu kurikulum dengan nama IPS pada jenjang pendidikan MTs/SMP hanya untuk menghilangkan kesan padatnya materi kurikulum MTs/SMP dan untuk memperlihatkan keberhubungan semu dengan kurikulum IPS di MI/SD. Posisi kurikulum semacam ini kurang menguntungkan, bila pendidikan ilmu-ilmu sosial di MTs/SMP diajarkan dalam bentuk terpisah, karena akan menampilkan ketidak seimbangan antara apa yang didefinisikan sebagai IPS pada bagian awal GBPP dengan kenyataan materi kurikulum. Pengertian IPS dalam kalimat pertama jelas memperlihatkan adanya upaya untuk menggunakan bentuk pendidikan IPS yang korelatif, tetapi apa yang dikemukakan dalam kalimat berikutnya menunjukkan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum IPS didasarkan pada pendekatan disiplin terpisah (Fay, 1967).

Posisi Social Studies pada Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Amerika Serikat

Social Studies di Amerika Serikat dikenal mulai awal tahun 1900-an dalam bentuk Studi Sejarah, Pemerintahan, dan Geografi. Pada awal-awal tahun tersebut terdapat keterbatasan sumberdaya kurikulum dan pasokan buku-buku teks materi ajar *social studies* hampir di setiap negara bagian. Muncul dan tumbuhnya penelitian tentang pendidikan pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an menyebabkan para guru lebih fokus pada pengajaran yang memberikan pemahaman tentang konsep-konsep, generalisasi dan keterampilan intelektual bukan sekadar memberikan

pelajaran yang dirancang untuk memberikan sekumpulan pengetahuan factual (Dasar et al., 2019). Kemudian, pertumbuhan organisasi profesi disetiap negara bagian dan nasional juga mulai berperan dalam membangun persiapan kurikulum dan standarisasi guru. Perubahan tersebut secara dramatis muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.

Pertumbuhan teknologi komputer mulai merevolusi industri penerbitan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Penerbit mulai menerbitkan buku teks disesuaikan dengan pedoman kurikulum pada setiap negara bagian. Faktor-faktor seperti kebangkitan perekonomian yang terjadi di negara Asia, globalisasi perdagangan dengan pengaruhnya yang tidak bisa dihindari dari perusahaan multinasional besar, dan kekalahan komunisme menuntut pengembangan standar kurikulum nasional untuk *Social Studies*, bentuk evaluasi, dan berbagai skema akuntabilitas baik untuk guru maupun sekolah. Departemen Pendidikan pada setiap negara bagian menentukan kebijakan secara umum dalam pengembangan kurikulum *Social Studies* pada kelas pendidikan dasar dapat berupa disiplin akademik (misal Sejarah, Geografi, Ekonomi, Kewarganegaraan) atau disesuaikan dengan sebagian maupun keseluruhan dari “Sepuluh Tema Keunggulan *Social Studies*” yang dikembangkan oleh *National Council for the Social Studies* (NCSS) (Rahmad, 2016). Anak-anak sekolah di Amerika belajar di kelas terdiri pria dan wanita termasuk di dalamnya minoritas ras dan etnis. Mereka belajar negara dan simbol negara, hari libur nasional. Materi pembelajaran mengikuti urutan lingkungan yang semakin luas mulai dari belajar tentang diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Alokasi waktu yang direkomendasikan untuk *Social Studies* berkisar dua puluh sampai tiga puluh menit per hari di kelas-kelas dasar awal dan tiga puluh sampai empat puluh menit untuk kelas dua atau tiga. Walaupun demikian banyak guru yang mengabaikan rekomendasi tersebut bahkan sama sekali menghilangkan *Social Studies* dari kurikulum. Gambaran kurikulum normatif untuk *Social Studies* sekolah menengah (kelas 6, 7, dan 8) nampak kabur, pada umumnya meliputi Geografi Dunia, Peradaban Barat, Sejarah Amerika Serikat, Sejarah Negara dan Kewarganegaraan. Siswa biasanya memiliki buku teks dengan panjang halaman mencapai 300-400 halaman. Pendekatan umum dalam pembelajaran di kelas adalah membaca buku, di-riview oleh guru dengan mengemukakan ide utama dan konsepnya, serta menuliskan jawaban atas pertanyaan.

Sedangkan *Social Studies* untuk tingkat menengah atas biasanya mencakup gabungan dari tema-tema pilihan. Negara bagian biasanya menentukan persyaratan kelulusan yang tinggi untuk sekolah mereka dalam hal “*Carnegie Unit*” atau bervariasi antara dua sampai empat unit untuk kelulusan dalam *Social Studies*. Kemudian dilakukan pelacakan terhadap mereka yang ingin mengikuti perkuliahan lebih lanjut atau tidak. Selama awal 1980-an dan 1990-an, pemerintah Amerika Serikat gencar mempromosikan berbagai perubahan pada kurikulum *Social Studies*. Berbagai upaya pengembangan standar nasional dilakukan, ujian nasional pertama kali dilaksanakan sehingga membawa perubahan terhadap pengembangan standar kurikulum K-12 untuk Sejarah dan Geografi. NCSS melakukan usaha-usaha pengembangan standar kurikulum *Social Studies* yang lebih luas, dan memperlakukan Sejarah juga Geografi merupakan bagian dari keseimbangan kurikulum komprehensif *Sosial Studies* K-12. Demikian pula, banyak organisasi yang berafiliasi dengan bidang pendidikan Kewarganegaraan bersatu di bawah naungan *Center for Civic Education* dan mulai mengembangkan standar nasional untuk Kewarganegaraan, dan

Ilmu Politik dengan pendanaan dari berbagai sumber dan hibah dari pemerintah federal (Suastika, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Dunia kerja. Posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum awal kemerdekaan termasuk dalam kelompok dasar yaitu kelompok mata pelajaran wajib yang dibangun untuk mengembangkan keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Kemudian pada kurikulum 1968 termasuk kelompok cipta yaitu mata pelajaran pendalaman pada jurusan tertentu. Kondisi ini menyebabkan Ilmu Pengetahuan Sosial bukan lagi sebagai mata pelajaran yang urgen di mata siswa dan menjadi mata pelajaran kelas dua. Kurikulum 1975 dan seterusnya mengembalikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dasar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan materi yang bersifat fusi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi mata pelajaran strategis dalam pengembangan keterampilan sosial siswa. *Social studies* di Amerika Serikat memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan nasionalis. *Social studies* merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk *good citizenship* (Endayani, 2017). Kondisi ini diperkuat dengan adanya asosiasi keilmuan Ilmu Pengetahuan Sosial yang menjadi penggerak untuk melakukan kajian khusus berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Sosial. Walaupun Social Studies merupakan seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, melalui *National Council for the Social Studies* (NCSS) dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasaan dan kedalaman materi yang jelas.

Saran

keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Kemudian pada kurikulum 1968 termasuk kelompok cipta yaitu mata pelajaran pendalaman pada jurusan tertentu. Kondisi ini menyebabkan Ilmu Pengetahuan Sosial bukan lagi sebagai mata pelajaran yang urgen di mata siswa dan menjadi mata pelajaran kelas dua. Kurikulum 1975 dan seterusnya mengembalikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dasar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan materi yang bersifat fusi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi mata pelajaran strategis dalam pengembangan keterampilan sosial siswa. *Social studies* di Amerika Serikat memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan nasionalis. *Social studies* merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk *good citizenship* (Endayani, 2017). Kondisi ini diperkuat dengan adanya asosiasi keilmuan Ilmu Pengetahuan Sosial yang menjadi penggerak untuk melakukan kajian khusus berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Sosial. Walaupun Social Studies merupakan seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, melalui *National Council for the Social Studies* (NCSS) dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasaan dan kedalaman materi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasar, P., Indonesia, D. I., Amerika, D. A. N., & Dahlan, U. A. (2019). *Pendidikan dasar di indonesia, jepang, dan amerika serikat*. 346–361.
- Endayani, H. (2017). Pengembangan Materi Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 92–110. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/download/1158/922>
- Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. *Journal of Early Intervention*, 33(3), 186–200. <https://doi.org/10.1177/1053815111425493>
- Farisi, M. I. (2013). *KURIKULUM REKONTRUKSIONIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : ANALISIS DOKUMEN KURIKULUM 2013*. 143–164.
- Fay, D. L. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–23.
- Leavy, P., Leavy, P., Harrison, A. K., Ellis, C., Adams, T. E., Brinkmann, S., Tucker, E. L., Prior, L., Holm, G., Hewson, C., Simons, H., & Leavy, P. (2014). *THE OXFORD HANDBOOK OF Understanding in Context*. April.
- Mills, J., & Birks, M. (2014). *Qualitative Methodology*. Sage Publications.
- Dasar, P., Indonesia, D. I., Amerika, D. A. N., & Dahlan, U. A. (2019). *Pendidikan dasar di indonesia, jepang, dan amerika serikat*. 346–361.
- Endayani, H. (2017). Pengembangan Materi Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 92–110. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/download/1158/922>
- Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. *Journal of Early Intervention*, 33(3), 186–200. <https://doi.org/10.1177/1053815111425493>
- Farisi, M. I. (2013). *KURIKULUM REKONTRUKSIONIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : ANALISIS DOKUMEN KURIKULUM 2013*. 143–164.
- Fay, D. L. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–23.
- Leavy, P., Leavy, P., Harrison, A. K., Ellis, C., Adams, T. E., Brinkmann, S., Tucker, E. L., Prior, L., Holm, G., Hewson, C., Simons, H., & Leavy, P. (2014). *THE OXFORD HANDBOOK OF Understanding in Context*. April.

- Mills, J., & Birks, M. (2014). *Qualitative Methodology*. Sage Publications.
- Nursyifa, A. (2019). *Transformasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4 . 0*. 6(1).
- Rahmad. (2016). Lt.Blkg Pend.Ips. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 67–78. <http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/muallimuna>
- Schroeder, J. E. (2006). Critical visual analysis. *Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing, September*, 303–321. <https://doi.org/10.4337/9781847204127.00032>
- Speidel, S. (2018). Lux presents hollywood: Films on the radio during the ‘golden age’ of broadcasting. *The Routledge Companion to Adaptation*, 265–277. <https://doi.org/10.4324/9781315690254>
- Suastika, I. N. (2021). Analisis Komparasi Social Studies di China dan Korea Selatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha*, 9(1), 60–69.
- Zealand, N. (2004). Qualitative Research in Tourism. *Qualitative Research in Tourism*. <https://doi.org/10.4324/9780203642986>